

**RESISTENSI SEHARI-HARI GURU MADRASAH ITH DI DESA RANUPANI**

**Muhammad Hafidh Fadli <sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

\* Email: [muhammadhafidhfadli@mail.ugm.ac.id](mailto:muhammadhafidhfadli@mail.ugm.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b>                      Received: 16 January 2025                      Revised: 19 January 2025                      Published: 21 January 2025</p> <p><b>Keywords:</b>                      Everyday resistance; Local Curriculum; Teacher; Madrasah ITH; Ranupani</p>	<p><i>This study examines the everyday resistance practices of teachers at Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda (Madrasah ITH), an educational institution located in Ranupani Village, East Java, facing the pressures of homogenized national education policies. Employing ethnographic methods, the research reveals how teachers respond to geographical, social, and policy challenges through subtle strategies such as developing curricula rooted in Tengger culture, eliminating formal education stratification, and adopting disciplinary approaches based on local wisdom. These strategies serve not only as resistance to state apparatuses but also as efforts to create culturally relevant and sustainable educational spaces. The findings demonstrate that teachers at Madrasah ITH act as agents of change, bridging traditional values with the demands of formal education systems. Their resistance not only preserves local cultural identity but also facilitates social transformation within the Tengger community. This research highlights the critical need to integrate local contexts into national education policies to establish more inclusive, adaptive, and community-responsive systems. The findings offer theoretical and practical contributions to the development of localized educational models in marginalized areas.</i></p>

Artikel Info	Abstrak
<p><b>Sejarah Artikel</b>                      Diterima: 16 Januari 2025                      Direvisi: 19 Januari 2025                      Dipublikasi: 21 Januari 2025</p> <p><b>Kata kunci:</b>                      Resistensi sehari-hari; Kurikulum Lokal; Guru; Madrasah ITH; Ranupani</p>	<p><i>Penelitian ini mengkaji praktik resistensi sehari-hari yang dilakukan oleh guru di Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda (Madrasah ITH), sebuah lembaga pendidikan di Desa Ranupani, Jawa Timur, yang berada di bawah tekanan homogenisasi kebijakan pendidikan nasional. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini mengungkapkan bagaimana guru merespons tantangan geografis, sosial, dan kebijakan melalui strategi subtil yang mencakup pengembangan kurikulum berbasis budaya Tengger, penghapusan stratifikasi pendidikan formal, serta adopsi pendekatan pendisiplinan berbasis kearifan lokal. Strategi ini tidak hanya menjadi bentuk resistensi terhadap aparat negara tetapi juga sebuah upaya untuk menciptakan ruang pendidikan yang relevan secara kultural dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di Madrasah ITH berperan sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan sistem pendidikan formal. Resistensi mereka tidak hanya mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi juga memfasilitasi transformasi sosial di komunitas Tengger. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi konteks lokal dalam kebijakan pendidikan nasional untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marjinal. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan model pendidikan berbasis lokal di wilayah tertinggal.</i></p>

**PENDAHULUAN**

Guru di kawasan tertinggal menghadapi tantangan yang kompleks dan sering kali kurang mendapat perhatian. Dalam konteks pendidikan Indonesia, mereka diharapkan menjadi ujung tombak keberhasilan kurikulum nasional (Amasuba, 2023; Heriyansyah, 2018) meskipun akses terhadap infrastruktur, pelatihan, dan sumber daya sangat terbatas (Saputra, 2023). Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, seperti Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa ini terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dengan masyarakat mayoritas suku Tengger yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sebagai daerah 'enclave,' Ranupani menghadirkan tantangan unik bagi guru dalam menjalankan tugas mereka. Selain tantangan geografis, ketersediaan sarana pendidikan di wilayah ini sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan dalam capaian pendidikan nasional (Hasanah, 2011).

Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda (Madrasah ITH) berdiri pada tahun 2019 dan menjadi salah satu alternatif pendidikan di Desa Ranupani. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis budaya (Huda, 2023), madrasah ini harus menghadapi tekanan dari berbagai aparat. Salah satu aparat yang memberikan

tekanan kuasa tersebut adalah aparatus negara. Tekanan-tekanan tersebut diantaranya adalah tuntutan mengikuti kurikulum merdeka dan beban administrasi yang tidak relevan dengan konteks lokal. Guru-guru Madrasah ITH, yang sebagian besar bukan penduduk lokal dan harus menempuh perjalanan jauh untuk mengajar, berusaha untuk mengembangkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan ini. Strategi-strategi tersebut seperti pengembangan kurikulum lokal hingga penghapusan jenjang pendidikan. Guru-guru ini mencoba menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Para guru ini juga berperan dalam menjembatani nilai-nilai lokal dengan kebutuhan pendidikan formal, sehingga menjadikan madrasah ini lebih dari sekadar institusi pendidikan, melainkan juga wadah pelestarian budaya.

Penelitian dengan tema kualitas pendidikan di daerah terpencil juga sudah banyak dilakukan. Penelitian Farid dan Pratitis (2022) mengungkapkan bahwa guru non-PNS di daerah tertinggal, seperti Pamekasan, Madura, harus menghadapi tekanan psikologis, sosial, dan kultural. Hal ini diakibatkan oleh minimnya akses, fasilitas, serta dukungan finansial yang akhirnya mempengaruhi rasa percaya diri dan kemampuan mereka. Sebagian dari mereka bahkan merasa menyesal memilih kuliah di jurusan keguruan dikarenakan status guru honorer yang mereka emban tidak memiliki kestabilan status. Sementara itu, Muhibah (2015) menemukan bahwa guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Kalimantan Tengah menghadapi beberapa masalah seperti kurangnya pengetahuan dalam membuat perangkat pembelajaran, mengkondisikan kelas, dan memanfaatkan media ajar. Dalam temuannya, hal tersebut mengakibatkan pembelajaran terasa monoton dan evaluasi hanya terfokus pada aspek kognitif untuk menghabiskan jam pelajaran saja. Temuan-temuan ini menunjukkan bagaimana praktik kuasa memberikan satu gambaran kondisi yang memperparah situasi guru di kawasan tertinggal. Selain itu, temuan dari Muhibah juga menunjukkan adanya praktik resistensi sehari-hari di lingkungan pendidikan yaitu upaya guru untuk mengulur waktu pembelajaran. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai respons guru terhadap kuasa (*power*) yang menekan tapi tidak memfasilitasi dengan baik. Praktik resistensi seperti ini dilakukan oleh resister baik secara sadar maupun tidak (Johansson & Vinthagen, 2016).

Literatur tentang resistensi oleh guru di Indonesia masih terbatas dan sering disalahpahami, dengan banyak penelitian yang lebih fokus pada pencegahan resistensi daripada memahami konteks praktiknya. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah milik Suprayetno dan Pohan (2022), Hayadi et al. (2024), serta Sutanto (2024) yang lebih menyoroti strategi penanganan resistensi sebagai upaya dukungan implementasi kurikulum merdeka. Sutanto (2024) menganggap metode pembelajaran tradisional sebagai bentuk resistensi guru yang harus dicegah melalui pembimbingan. Apa yang terjadi di Indonesia berlawanan dengan penelitian (Choi, 2017) di Korea Selatan, yang menunjukkan bahwa resistensi guru bahasa Inggris terhadap reformasi kurikulum dilakukan secara tersembunyi, seperti memperlambat administrasi sertifikasi atau mempengaruhi rekan kerja. Dalam kesimpulannya, Choi menyatakan bahwa praktik resistensi sehari-hari dapat dipandang sebagai titik tolak negosiasi terhadap kebijakan dan bukan dianggap sebagai penghambatnya (Choi, 2017). Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bagaimana resistensi di Indonesia lebih sering dilihat sebagai ancaman (Sutanto, 2024) dibandingkan sebagai tanggapan terhadap beban komunal, seperti yang diungkapkan Choi. Kekurangan literatur dan kesalahpahaman terhadap konsep resistensi, seperti dalam tulisan Muhaimin dan Kristiawan (2019), menunjukkan perlunya penelitian mendalam untuk memahami resistensi dalam dunia pendidikan Indonesia dari perspektif keberpihakan pada guru.

Praktik kuasa (*power*) telah banyak dikaji, terutama oleh Michael Foucault yang memandang kuasa bukan sebagai kepemilikan, tetapi sebagai strategi untuk membatasi potensi individu melalui berbagai teknik seperti hierarki, stereotip, dan pendisiplinan (Foucault et al., 2019; Johansson & Vinthagen, 2016). Kuasa bertujuan untuk menjaga kelanggengan dominasi dengan cara mendominasi (Gramsci dalam Johansson & Vinthagen, 2020). Praktik kuasa berlangsung melalui aparatus-aparatusnya. Dalam konteks ini, aparatus dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki kemampuan untuk menangkap, mengarahkan, menentukan, memengaruhi, membentuk, mengontrol, atau mengamankan gerak-gerik, perilaku, opini, atau wacana makhluk hidup (*living beings*) (Agamben, 2009). Dengan meluasnya jaringan relasi kuasa, resistensi menjadi respons yang tak terhindarkan, baik secara individu maupun komunal. Resistensi ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti *counter-hegemony* (Gramsci), *counter-movement* (Polanyi), atau *infrapolitics* (Scott) yang masing-masing menargetkan aparatus negara, tekanan pasar, atau ideologi (Johansson & Vinthagen, 2020). Menariknya, resistensi tidak selalu terlihat sebagai aksi massa yang terorganisir, tetapi juga hadir dalam

tindakan individu yang berulang sehingga membentuk pola budaya resistensi atau dikenal sebagai perlawanan sehari-hari (*everyday resistance*). Perlawanan ini sering kali tersembunyi, bersifat individual, dan tidak secara langsung diartikulasikan secara politis, namun tetap efektif dalam melemahkan kuasa dalam kehidupan sehari-hari (Johansson & Vinthagen, 2020; Scott, 1990, 2000)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindakan resistensi sehari-hari yang dilakukan oleh guru Madrasah ITH terhadap tekanan aparatus negara. Penelitian ini mengeksplorasi praktik-praktik resistensi subtil yang tidak hanya merefleksikan penolakan terhadap kuasa, tetapi juga upaya membangun sistem pendidikan yang relevan secara kultural (Apple, 2011; Giroux, 2023). Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana praktik pendidikan di daerah tertinggal dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan identitas lokal sekaligus beradaptasi dengan kebijakan nasional. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menggali bagaimana guru sebagai individu dan kelompok berperan sebagai agen perubahan dalam konteks sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks ini, praktik resistensi guru bukan hanya bentuk perlawanan, tetapi juga kritik terhadap homogenisasi kebijakan pendidikan nasional. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat bagaimana pendidikan lokal tidak sekadar bertahan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan budaya dan keberdayaan masyarakat (Apple, 2019). Pendidikan berbasis lokalitas di Madrasah ITH menawarkan alternatif yang relevan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang unik, sembari tetap mempertahankan integritas budaya yang ada. Upaya ini tidak hanya memelihara nilai-nilai tradisional, tetapi juga memberikan ruang bagi transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat memperoleh data kualitatif yang bersifat holistik. Pengumpulan data berlangsung sejak bulan September hingga Oktober 2024. Lokasi penelitian ini berfokus pada Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda (Madrasah ITH), desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *in-depth interview*, observasi-partisipan, dan dokumentasi. Data tersebut diperoleh dari beberapa subjek penelitian yang mendukung tema penelitian. Subjek tersebut dipilih berdasarkan keterlibatan langsung, pengalaman, dan pengetahuan lokal yang dapat mendukung temuan dari penelitian ini. Subjek utama dalam penelitian ini adalah guru Madrasah ITH, siswa Madrasah ITH, wali murid Madrasah ITH, dan masyarakat desa Ranupani.

Informasi-informasi yang telah dikumpulkan kemudian direduksi berdasar tema penelitian untuk kemudian diolah menjadi data penelitian. Data-data ini berupa transkrip wawancara, foto, dan studi dokumentasi. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis menggunakan analisa tematik yang menekankan pada temuan data dan tidak memaksakan interpretasi pada konsep-konsep yang telah disediakan (Hammersley & Atkinson, 2007). Hal ini berguna untuk menjauhkan pendakwaan (*judgement*) terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penolakan terhadap Kurikulum Merdeka**

Madrasah ITH dengan tegas menolak penerapan kurikulum merdeka. Dalam satu wawancara dengan kepala sekolah, ia mengatakan "saya sudah merdeka sebelum kurikulum merdeka!" Hal ini kemudian mengantarkan pada beberapa kisah yang akhirnya menjawab pernyataan kontroversial tersebut. Dalam kisah pertama, Pak Fizi, kepala sekolah Madrasah ITH, merupakan seorang yang berwatak idealis dan memiliki harapan serta keinginan yang tinggi. Hal ini disampaikannya dalam satu pernyataan yang menyatakan bahwa, "*saya itu pernah berdoa supaya diberi kesempatan untuk menciptakan peradaban sendiri. Eh sama gusti Allah sekarang diberi kesempatan untuk mengajar di sini [Madrasah ITH]. Sewaktu saya muda, saya melihat desa Ranupani ini adalah desa yang sangat indah, sehingga ketika saya melihat bahwa yang bisa saya lakukan untuk menjaga kelestarian desa ini adalah dengan mengubah pola pikir masyarakatnya. Supaya tidak mudah dibohongi dan tanahnya tidak lagi terus-terusan dijajah seperti saat ini.*" (Wawancara langsung dengan Pak Fizi, 7 September 2024)

Dalam sedikit kutipan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa sikap idealis yang dimiliki oleh Pak Fizi tersebut berdasar pada pengalamannya yang secara kronologis melihat kondisi desa Ranupani. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Fizi, bahwa kondisi desa Ranupani hari ini sedang tidak cukup baik-baik saja.

Kondisi ini disebabkan oleh hadirnya pihak eksternal yang ingin menguasai beberapa lahan dan aset komunal, seperti sumber mata air, yang kemudian akan dimanfaatkan sebagai aset pariwisata dengan kepemilikan personal. Tentu hal ini menjadi satu ancaman yang patut diwaspadai oleh masyarakat desa Ranupani. Belum lagi kehadiran negara melalui aparatus-aparatusnya ternyata bukan ikut melestarikan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Tengger di sana, tapi justru malah memberikan batasan-batasan ruang yang tidak menguntungkan mereka. Hal ini memang tidak dapat kita saksikan secara jelas, tapi apabila ditelisik lebih dalam lagi beberapa hak hidup mereka perlahan-lahan mulai digeser. Pergeseran hak hidup ini dimulai dengan terpilihnya desa Ranupani sebagai salah satu dari sepuluh desa wisata terbaik se-Indonesia pada tahun 2023 (Desa Ranupani, 2024). Dengan predikat tersebut, secara tidak langsung negara mulai mencoba menggeser mata pencaharian warga yang sebermula adalah petani kemudian digeser menjadi penggerak sektor-sektor pariwisata. Sementara itu, sejak tahun 2021 pembangunan aspek pariwisata ini sebenarnya sudah dilakukan dengan membangun teater arena (*outdoor amphitheater*), area singgah (*rest area*), dan lain sebagainya. Pembangunan-pembangunan ini dilakukan di wilayah pinggir danau Ranupani sehingga hampir tiga perempat wilayah danau ini dikelilingi oleh sarana pariwisata. Naasnya, pembangunan-pembangunan sektor pariwisata ini justru dibangun tepat di atas sumber mata air danau Ranupani. Sehingga, volume danau tersebut sudah tidak dapat lagi bertambah, tapi justru berkurang dan membuat danau Ranupani mengalami pendangkalan (Pamungkas, 2019).

Masalah ekologis ini tidak banyak dipedulikan oleh masyarakat setempat dan hanya sedikit saja yang turut memprihatinkan kondisi danau Ranupani. Hal ini juga disebabkan oleh nalar kritis masyarakat yang belum dibangun secara baik pada jenjang pendidikan. Hal ini kemudian didukung oleh fakta bahwa sekalipun sudah mengenyam jenjang pendidikan dasar, masih banyak masyarakat desa Ranupani yang belum lancar kemampuan calistung (baca, tulis, dan berhitung). Kondisi tersebut dikarenakan mereka hanya belajar sewaktu di sekolah saja. Sementara itu, peran orang tua sebagai fasilitator belajar di rumah tidak berjalan dengan baik. Dari temuan hasil observasi, menunjukkan bahwa peran orang tua di rumah hanya sebagai evaluator hasil pendidikan di sekolah saja seperti menanyakan apa yang tadi diajarkan, tanpa mengecek ulang kemampuan anaknya. Durasi pertemuan antara anak dan orang tua dalam sehari terkadang tidak lebih dari 4-5 jam saja terhitung setelah pukul 18.00 WIB. Hal ini dikarenakan kesibukan orang tua yang harus mengurus ladang sejak pukul 05.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sementara itu, sepulang sekolah anak-anak akan menghabiskan waktunya untuk bermain sejak pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB. Pertemuan anak dan orang tua ini dapat dikatakan dalam kondisi yang kurang kondusif dikarenakan masing-masing pihak sudah mengalami kelelahan karena aktivitas mereka selama sehari. Hal ini jugalah yang pada akhirnya membuat distribusi pengetahuan antara orang tua dan anak sedikit merenggang (Spindler, 1987). Dengan kondisi pembelajaran di rumah yang demikian, tidaklah heran apabila kemampuan literasi masyarakat desa Ranupani dapat dikatakan sebagai masalah kultural. Kalimat ini menekankan bahwa dibutuhkan perhatian lebih untuk menekan angka buruknya kemampuan literasi masyarakat.

Apabila hal ini kemudian ditarik kembali pada pernyataan Pak Fizi bahwa rendahnya kemampuan literasi tersebut akan memberikan dampak pada hak hidup mereka tentu dapat dikatakan kebenarannya. Rendahnya kemampuan literasi inilah yang kemudian membuat Pak Fizi dengan tegas berkeinginan untuk membantu kemampuan literasi dasar masyarakat melalui pembelajaran di Madrasah ITH. Dengan mengetahui latar belakang dan kondisi masyarakat desa Ranupani, alasan Pak Fizi untuk menolak ajakan penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional menjadi konkret. Mengapa demikian? Menurut penuturan Pak Fizi ketidakcocokan antara kurikulum nasional dan kondisi lokalitas disebabkan oleh anggapan dari pusat bahwa seluruh siswa telah memiliki kemampuan calistung ketika masuk ke jenjang pendidikan dasar. Sehingga pemberian modul ajar yang diberlakukan secara nasional dianggap dapat memfasilitasi siswa. Anggapan tersebut tentu berbanding terbalik dengan kondisi siswa yang berada di desa Ranupani. Menurut penuturan Bu Khoirin sebagai guru kelas membaca masih banyak siswanya yang belum bisa baca-tulis sama sekali ketika baru saja menempuh pendidikan di Madrasah ITH. Sehingga, ia harus mengulang kembali pembelajaran

mengenali alfabet dan angka. Pembelajaran ini tentu membutuhkan proses yang panjang dan tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu minggu ataupun bulan hingga mereka benar-benar mengenali bentuk huruf dan mampu membacanya dalam satu tatanan teks. Belum lagi, hampir pada segala aspek yang ditekankan oleh kurikulum nasional adalah kemelekan teknologi sebagai salah satu capaian pembelajaran. Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai memang menjadi faktor penghambat yang cukup kuat untuk tercapainya visi ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern seperti laptop dan komputer masih dirasa tidak cukup relevan dengan kondisi masyarakat desa Ranupani. Bukan secara faktor ekonomi, tapi lebih pada pertimbangan aspek fungsionalitas mereka sebagai seorang petani lahan. Dengan demikian, tidaklah heran apabila Madrasah ITH kemudian lebih memilih mengembangkan kurikulum mereka sendiri dengan berdasar aspek lokalitas dan menolak penggunaan kurikulum merdeka sesuai anjuran kurikulum nasional.

Pengembangan kurikulum berbasis lokalitas ini banyak didukung oleh penyaringan sumber bahan ajar yang dirasa tepat sasaran. Penyaringan sumber bahan ajar ini dilakukan oleh Pak Fizi selaku kepala sekolah. Menurutnya dalam menggapai visi pendidikan Madrasah ITH, ia banyak terinspirasi oleh buku psikologi populer karangan James Clear yang berjudul "*Atomic Habit*". Dalam buku tersebut menganjurkan bahwa kebiasaan itu harus dipupuk menjadi lebih baik meskipun pertumbuhannya hanya 1% sehari (Clear, 2018). Kebiasaan baik ini yang menurut Pak Fizi harus betul-betul dipahami terhadap siswa-siswanya. Hal ini kemudian akan berkaitan dengan pola pengerjaan tugas siswa, aktivitas pembelajaran siswa, instrumen pembelajaran, dan pendisiplinan pola perilaku siswa. Dalam pola pengerjaan tugas, siswa akan diminta untuk mengerjakan satu lembar kertas menggunakan pensil, ketika ia telah selesai mengerjakan, ia akan diberikan kertas lagi dengan lembar soal yang sama sampai di akhir pembelajaran. Dalam temuan hasil observasi, selama 90 menit pembelajaran rata-rata siswa laki-laki akan mengerjakan soal sebanyak 1-2 kali pengerjaan, sedangkan siswa perempuan bisa mengerjakan sebanyak 3-4 kali pengerjaan. Hal ini dilakukan supaya siswa menjadi terbiasa dengan pengulangan-pengulangan yang terus menerus. "Supaya mereka ingat karena saat di rumah kecil kemungkinan mereka untuk belajar lagi," ujar Bu Khoirin. Terbukti hal tersebut dapat memberikan ketajaman ingatan siswa terhadap pola-pola alfabetik maupun numerik mereka, meskipun kemampuan mereka terhitung cukup lambat tapi setidaknya mereka menemukan pola belajar yang sesuai dengan kemampuannya.

Dari pemaparan data tersebut dapat dianalisa bahwa terjadinya praktik resistensi yang dilakukan oleh Madrasah ITH tidak hanya berkuat dalam persoalan ketidakcocokan antara kurikulum nasional dan lokal saja. Hal lain yang akhirnya mendorong praktik resistensi ini adalah adanya pertentangan ideologis antara apa yang diharapkan oleh aparatus negara melalui kebijakan kurikulumnya dengan ideologi pihak madrasah yang lebih mengetahui lokalitas wilayahnya. Tindakan resistensi ini tidak semata-mata berlangsung begitu saja, tapi juga didorong oleh rasa empati Pak Fizi melihat kondisi desa Ranupani yang berada dalam situasi pengaturan pemerintahan (*governmentality*) yang bersifat destruktif tidak kentara (Foucault, 1991). Dengan demikian, praktik resistensi sehari-hari yang dilakukan oleh Pak Fizi melalui sistem pendidikan Madrasah ITH didasari oleh historikal panjang (Johansson & Vinthagen, 2016) yang akhirnya mendorong madrasah sebagai institusi subordinat (*subordinated institution*) bertindak sebagai agensi resistensi yang mewakili perasaan komunal.

### **Penghapusan Jenjang Pendidikan**

Sejalan dengan konsep sebelumnya bahwa pembentukan kurikulum lokal didasarkan pada dimensi kultural dan kemampuan siswa, Madrasah ITH juga memiliki satu konsep penjenjangan pendidikan yang unik. Madrasah ITH tidak memiliki jenjang (*level*) seperti kelas 1-6, tapi berdasar pada pengklasifikasian kemampuan siswa. Hal ini tentu tidak dilakukan tanpa alasan, beberapa pertimbangan yang diberikan memiliki aspek kelogisan yang patut diapresiasi. Pertimbangan pertama, tidak adanya fasilitas sarana gedung sekolah yang memadai. Di dalam bangunan Madrasah ITH hanya terdapat 5 ruang (*classroom*) yang terdiri dari 3 ruang kelas yang disekat tembok dan 2 ruang kelas tidak bersekat yang bersifat serba guna. Ketiga ruangan ini merupakan ruang kelas berhitung dan membaca, membaca dan menulis, dan ekspositori. Sedangkan dua ruang kelas tanpa sekat merupakan ruang yang biasa digunakan untuk kelas pendidikan agama islam maupun kelas *nderes* atau pembelajaran Al Quran. Dengan kurangnya sarana pembelajaran tersebut, tidak cukup memungkinkan untuk membuat sistem jenjang kelas di Madrasah ITH.

Pertimbangan berikutnya adalah sistem pengklasifikasian dirasa lebih cocok dengan kebutuhan siswa dan juga guru di Madrasah ITH. Kebutuhan ini didasarkan pada kebutuhan keahlian (*skill*) baik bagi siswa maupun guru. Seperti di kelas membaca dan menulis beberapa siswa merupakan siswa yang telah mengampu durasi pendidikan selama 2-3 tahun masa sekolah. Akan tetapi, juga terdapat beberapa siswa yang sudah menempuh durasi pendidikan selama 4-5 tahun masa sekolah yang masih mengikuti pelajaran dasar membaca dan menulis. Hal ini dikarenakan siswa tersebut dirasa masih kurang memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Meskipun menggunakan sistem klasifikasi seperti yang diutarakan, Madrasah ITH tetap menggunakan sistem pendidikan dasar 6 tahun sekolah. Sekalipun madrasah ini masih belum memiliki alumni, pihak sekolah hanya akan mengakui alumninya ketika ia dinyatakan lulus selama masa pendidikan 6 tahun sekolah. Kedua pertimbangan inilah yang membuat Madrasah ITH memilih untuk menghapuskan jenjang tingkatan pada sistem sekolah mereka.

Penghapusan jenjang ini ternyata tidak hanya berlaku pada siswa saja, tetapi juga berlaku pada jabatan stratifikasi sekolah. Meskipun Pak Fizi memegang jabatan kepala sekolah, satu strata di atas guru yang lainnya, ia mengaku bahwa lebih senang dianggap seperti guru lainnya. Penghapusan pola pikir penjenjangan ini juga berkaitan dengan pembagian beban kerja guru. Hampir semua guru di madrasah ini memiliki beban tugas yang sama, yaitu mengajar saja. Pembebanan ini juga berkaitan dengan pertimbangan jarak antara rumah guru ke madrasah. Selain itu, pembebanan kerja guru tidak lagi dibebani oleh beban administrasi yang menyibukkan mereka. Beban administrasi seperti pengisian dan pembuatan perangkat pembelajaran sudah tidak lagi diberlakukan. Jadi, kehadiran guru hanya murni sebagai pengajar semata. Segala perangkat pembelajaran telah disediakan oleh Pak Fizi. Hal ini dikarenakan hanya Pak Fizi semata yang mengetahui seluk beluk administrasi pendidikan. Ilmu itu ia peroleh ketika mengenyam pendidikan sarjana. Selain itu hanya Pak Fizi jugalah yang menamatkan pendidikan hingga gelar sarjana, guru-guru yang lain lebih banyak menghabiskan masa pendidikannya pada pendidikan agama di pondok pesantren. "Saya itu menghargai guru-guru di sini dan tidak pernah menganggap mereka sebagai bawahan saya. Status kami sama. Sama-sama pengajar," ujar Pak Fizi dalam satu wawancara. Dengan fakta demikian, penghapusan stratifikasi jenjang guru di Madrasah ITH juga dapat dikatakan sebagai praktik resistensi terhadap pola kerja satuan pendidikan yang menganut sistem atasan-bawahan.

Pola serupa sebenarnya juga berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Tengger yang menghapuskan sistem stratifikasi sosial. Sistem ini dapat dilihat dari sistem pewarisan tanah. Dalam urusan pewarisan tanah, masyarakat Tengger tidak menganut sistem patrilineal maupun matrilineal (Pamungkas, 2019). Semua anak memiliki hak atas tanah yang dibagikan secara adil dan merata oleh orang tua mereka. Dalam satu contoh, Bu Parti telah membagikan tanah miliknya yang berjumlah 1 hektar kepada 3 orang anaknya. Masing-masing anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan jumlah yang sama sebesar 0,25 hektar. Sedangkan sisa tanah 0,25 hektar masih dimiliki oleh Bu Parti untuk menyambung hidupnya sehari-hari sebagai petani lahan. Hal semacam ini tentu menjadi keotentikan masyarakat Tengger yang memilih untuk membagikan harta warisan secara adil tanpa melihat status anak (Hefner, 1990). Masyarakat Tengger juga membuka lebar pintu rumah mereka terhadap tamu-tamu yang datang, baik itu tetangga maupun wisatawan. Mereka dapat hidup dengan rukun tanpa ada perasaan menggurui ataupun membawahi satu sama lain. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat yang hidup penuh dengan kedamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam bermasyarakat.

Ketiga temuan tersebut memberikan data ikatan kuat tentang bagaimana penolakan terhadap struktur dapat menciptakan satu koherensi pola yang dapat disebut sebagai keterpolaan kebudayaan. Meskipun Madrasah ITH merupakan instansi baru yang bukan berasal dari produk masyarakat Tengger, tetapi kesamaan pola inilah yang kemudian dapat membungkus suatu sistem pendidikan tampak bersifat melokal (Wilson, 2022). Lokalitas inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh sistem-sistem di setiap sekolah. Tidak hanya di sekolah yang berada di wilayah tertentu, tetapi di semua sekolah dengan keotentikan wilayahnya masing-masing.

Pola penolakan sistem stratifikasi ini juga memberikan indikasi yang kuat terhadap bagaimana suatu praktik resistensi yang sesungguhnya terjadi. Dalam cakupan yang lebih luas, sekalipun tidak dapat dihindarkan, praktik stratifikasi inilah yang membentuk pola relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas

ini dapat dilihat melalui perbedaan jenjang usia, status jabatan, penggunaan bahasa, status sosial, dan status ekonomi seseorang. Relasi yang berjalan tersebut pada praktiknya juga akan memberikan satu ketegangan tersendiri yang membuat individu maupun kelompok dapat melakukan tindakan resistensi baik secara terbuka maupun tertutup (Scott, 2000). Apa yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa dengan memposisikan diri dalam kesejajaran sebenarnya berupaya untuk membebaskan diri dari kelanggengan relasi kuasa yang tampak nyata. Upaya-upaya ini menurut Agamben juga dapat dikatakan sebagai *counter apparatus* (Agamben, 2009). Sekalipun susah untuk bisa melepaskan diri dari sistem yang serba hierarkis ini, setidaknya Madrasah ITH dan masyarakat desa Ranupani telah melepaskan satu persatu mata rantai untuk memerdekakan dirinya.

### **Pendisiplinan dengan Pendekatan Lokalitas**

Salah satu hal yang juga cukup menarik dari Madrasah ITH adalah cara pendisiplinan mereka terhadap siswa selalu bersumber dari lokalitas masyarakat setempat. Upaya pendisiplinan ini merupakan bagian dari praktik pendidikan sekolah (*schooling*). Praktik pendisiplinan ini adalah upaya untuk membentuk sikap siswa supaya sesuai dengan norma yang diinginkan oleh sekolah. Sikap yang diharapkan oleh sekolah adalah sikap kepribadian yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Visi madrasah ini adalah *terwujudnya Lembaga Pendidikan Madrasah ITH Ranupani yang unggul dan mampu melahirkan 1000 kader islam yang bertakwa, cerdas, pandai menggunakan teknologi, berjiwa melestarikan budaya suku tengger, dan berjiwa penggerak pelestari alam*. Dalam visi tersebut terdapat beberapa frasa yang patut dicermati.

Frasa pertama yang harus dicermati adalah "...mampu melahirkan 1000 kader Islam yang bertakwa, cerdas,..." . Dalam frasa tersebut jelaslah Madrasah ITH memiliki harapan tinggi terhadap anak didiknya untuk menjadikan mereka sebagai kader-kader Islam yang dapat memberikan dampak bagi perkembangan pengetahuan Islam pada tingkat lokal hingga internasional. Tentu untuk menjadi seorang kader atau agensi agama yang baik harus dibarengi dengan jiwa penuh takwa dan bekal kecerdasan yang mumpuni. Dalam hal ini upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh Madrasah ITH adalah dengan memberikan pendidikan agama Islam pada murid-muridnya. Pendidikan agama Islam yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh kurikulum nasional yang didistribusikan oleh departemen keagamaan (depag), melainkan melalui cara-cara kepesantrenan. Hal ini dilakukan karena rata-rata guru pernah menempuh pendidikan agama Islam di pondok pesantren sekitar wilayah Lumajang dan Malang. "Kami lebih familiar dengan kitab-kitab pondok daripada buku yang diberikan oleh depag. Kitab-kitab pondok itu langsung ke inti sarinya. Kalau buku-buku itu kan *comot* sana sini," ujar Pak Rio sebagai salah satu pengajar mata pelajaran Al Quran dan Hadits. Bahan ajar yang diajarkan dalam madrasah ini memang bersumber dari kitab kuning yang biasanya diajarkan di pondok pesantren. Kitab-kitab yang dipilih merupakan kitab-kitab pengantar yang dirasa lebih cocok apabila diajarkan pada siswa-siswa Madrasah ITH. Dapat dikatakan bahwa untuk mendukung generasi yang mereka inginkan, Madrasah ITH bahkan telah melakukan upaya penolakan terhadap aparatus negara dengan tidak menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh kurikulum nasional.

Dalam frasa berikutnya adalah "...berjiwa melestarikan budaya suku Tengger,...". Dalam frasa tersebut dapat diinterpretasikan bahwa sekolah berupaya untuk ikut serta melestarikan kebudayaan suku Tengger. Dalam praktiknya, frasa ini dapat dilihat dalam beberapa aktivitas. Aktivitas pertama adalah adanya kebijakan sekolah yang menyatakan bahwa siswa diwajibkan menggunakan baju adat Tengger pada hari Rabu. Baju adat ini berupa beskap dan celana hitam, udeng, dan sarung (bagi laki-laki) atau *kaweng* (bagi perempuan). Penyeragaman ini juga sebagai pengingat identitas mereka sebagai orang Tengger supaya terus berbangga dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Salah satu atribut yang menjadi identitas mereka adalah sarung dan *kaweng* (sejenis kain kebaya khas Tengger). Penggunaan sarung ini berfungsi sebagai penghangat badan dikarenakan suhu udara di desa Ranupani berkisar antara -4° Celcius hingga 23° Celcius. Penggunaan sarung ini, sekalipun masih banyak dijumpai, nampaknya sudah mulai sedikit tergeser oleh hadirnya pasar jaket impor yang mulai digemari dan dikenakan oleh kalangan kaum muda. Alasan ini berkaitan dengan gaya (*fashion*) dan juga kepraktisan. Melihat fenomena tersebut, Madrasah ITH kemudian mengambil langkah antisipasi dengan memberikan kebijakan pendisiplinan pemakaian seragam adat di hari Rabu.

Pendisiplinan tersebut sebenarnya tidak hanya sebagai langkah antisipasi, tapi juga sebagai langkah politis supaya Madrasah ITH memiliki keotentikan ikonik sebagai sekolah yang berada di kawasan adat

Tenger. Hal ini tampak pada satu acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk seluruh civitas akademik di desa Ranupani. Pada hari itu, hampir seluruh siswa dari SDN 1 Ranupani, SMP Satu Atap Ranupani, dan Madrasah ITH berkumpul di lapangan pinggir danau Ranupani. Dalam momen itu, siswa dari sekolah negeri mengenakan seragam pramuka dan siswa Madrasah ITH mengenakan baju adat mereka. Melihat perbedaan tersebut, beberapa siswa Madrasah ITH lebih banyak diberikan kesempatan untuk unjuk gigi di hadapan mata kamera. Dalam momen tersebut bahkan seorang siswa sampai diajak berfoto bersama direktur Bank Indonesia cabang Jawa Timur sebagai model di sampul halaman berita koran Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut juga memberikan makna simbolik bahwa melalui seragam, posisionalitas sekolah menjadi lebih tampak dan berbeda dari sekolah-sekolah pada umumnya melalui seragam-seragam yang umum digunakan. Pemilihan kebijakan ini juga dapat dikatakan sebagai upaya resistensi dari kuasa penyeragaman sekolah yang dianjurkan oleh negara.

Frasa ketiga yang patut dicermati adalah frasa "...berjiwa penggerak pelestari alam." Hal ini berkaitan dengan penjelasan pada pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan kondisi alam dan kesadaran ekologis masyarakat. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa terjadinya masalah ekologis yaitu penyempitan dan pendangkalan danau Ranupani agaknya tidak begitu dipikirkan oleh negara yang nyatanya lebih mementingkan proyek pariwisata di desa tersebut. Dalam menyikapi hal ini, Pak Fizi kemudian mencanangkan program kepada siswanya untuk sadar akan lingkungan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan selalu diucapkannya doa pada penutup pembelajaran yaitu "semoga danau Ranupani bisa segera pulih dan kembali seperti sedia kala." Doa itu kemudian bersahut dengan teriakan mengamini yang tulus dari para siswa-siswanya. Hal itu dilakukannya hampir setiap hari di penghujung pembelajaran. Tentu upaya ini merupakan suatu ujaran pengingat bagi seorang guru untuk terus menumbuhkan sikap kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Doa ini tentunya tidak hanya sebatas doa yang mangabar begitu saja, tapi juga dibarengi dengan aksi praksis sekolah. Aksi ini adalah aksi penanaman 1000 pohon yang dilakukan oleh Madrasah ITH yang berkolaborasi dengan para pecinta alam yang berdomisili di daerah Lumajang dan Malang. Bibit-bibit pohon ini ditanam di sekitar wilayah pembangunan proyek pariwisata yang mengelilingi danau Ranupani. Aksi ini tidak hanya berhenti pada kegiatan penanaman bibit pohon saja, tapi juga memberikan benih bibit pohon kepada masyarakat sekitar untuk ditanam di area danau maupun lahan pertanian miliknya. Dengan adanya kegiatan ini sebenarnya penumbuhan sikap mencintai alam tidak hanya diberikan pada para siswa-siswa Madrasah ITH saja, tapi juga masyarakat sekitar untuk kembali acuh pada lingkungan di mana mereka berkehidupan selama ini. Kegiatan ini kemudian juga mendapat respon positif oleh beberapa pihak, salah satunya pihak taman nasional. Tindakan ini juga dapat merujuk pada praktik resistensi, yaitu praktik resistensi terhadap keberjarakan negara yang lebih banyak mengeksploitasi lahan masyarakat dan mengesampingkan dampak ekologis yang ditimbulkannya. Selain itu, tindakan resistensi ini juga merupakan reaksi dari pihak *subordinated* yang memberikan perlawanan terhadap invasi ruang hidup mereka. Melakukan aksi penanaman pohon di sekitar wilayah danau merupakan sebuah simbolik atas perebutan ruang dan menancapkan kembali bibit pohon di tempat di mana seharusnya ia tumbuh dan terus memberikan penghidupan. Inilah yang disebut sebagai ruang ketiga di mana ruang menjadi satu arena resistensi terhadap satu kuasa yang mendudukinya (Lilja, 2022).

Ketiga frasa yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa pengimplementasian visi Madrasah ITH sebagian besar merujuk pada tindakan resistensi. Praktik resistensi ini dilakukan dalam wujud-wujud simbolik. Praktik resistensi yang dilakukan secara simbolik ini menurut Scott (1990) adalah praktik yang dipilih sebagai jalan alternatif untuk mengungkapkan sikap penolakan yang sifatnya bersifat subtil. Melalui tindakan-tindakan simbolik ini secara tidak langsung memberikan pengalaman nirsadar (*unconscious*) baik pada kuasa sebagai target maupun subjek lain untuk ikut terlibat dalam praktik resistensi (Johansson & Vinthagen, 2015). Jika praktik resistensi simbolik ini terus-terusan dilakukan, maka kekuatan resistensi ini bisa menjadi kuasa tandingan yang dapat melemahkan kuasa sebelumnya. Kesadaran resister melalui tindakan-tindakan simbolik ini juga memberikan peluang baru terhadap konsep ruang. Dalam pengertian ini, ruang tidak hanya merujuk pada tempat atau lokasi saja tapi juga berkaitan dengan letak di mana resistensi sebagai sebuah konsep bernaung. Dalam pemaknaan ini, tubuh juga dapat dianggap sebagai ruang resistensi (Bhandari, 2022), seperti halnya kebijakan penggunaan seragam adat yang dianjurkan oleh Madrasah ITH terhadap siswanya.

Keterlibatan tubuh siswa menjadikannya sebagai arena resistensi baik terhadap negara maupun kultural masyarakat yang diserang arus modernisasi. Selain itu, temuan dalam tulisan ini menjadi bertentangan dengan pandangan Foucault (1991) bahwa pendisiplinan merupakan proses pembentukan kuasa. Dalam konteks penelitian ini pendisiplinan justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana resistensi yang bertujuan untuk memberikan kedaulatan bagi para kaum *subordinated*. Dengan melakukan praktik pendisiplinan yang dilakukan sebagai praktik resistensi, dapat dikatakan bahwa suatu tindakan pendisiplinan yang bersifat berulang dapat membentuk kesadaran komunal terhadap jejaring relasi kuasa dan dengan segera dapat menyadarkan diri mereka melalui tindakan resistensi dengan kreativitasnya masing-masing.

Dari beberapa hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat diberikan beberapa pola gambaran besar yang dapat diidentifikasi sebagai praktik perlawanan sehari-hari yang dilakukan oleh guru Madrasah ITH. Praktik-praktik tersebut di antaranya adalah penolakan terhadap kurikulum, penghapusan sistem stratifikasi, dan pengembalian hak lahan. Praktik-praktik ini merupakan praktik yang menentang kuasa kependudukan negara terhadap satu sistem pendidikan di kawasan tertinggal seperti desa Ranupani. Dengan data-data temuan yang telah dipaparkan, praktik-praktik resistensi ini bukan ditujukan sebagai satu tindakan subversif tapi lebih pada tindakan kritik terhadap suatu kebijakan. Praktik-praktik resistensi ini jika ditinjau secara lebih luas, maka akan memberikan gambaran terperinci perihal bagaimana budaya resistensi pada kalangan *subordinated* dilakukan. Jika merujuk pada pandangan Foucault bahwa di mana ada kuasa di situ ada resistensi (Foucault, 1991), maka penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana praktik resistensi berjalan dengan subtil untuk mengkritik praktik kuasa. Dengan adanya tulisan ini dapat memberikan gambaran praktik resistensi yang dilakukan oleh guru yang hari ini berada di posisi tekanan jejaring kuasa yang begitu dahsyatnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik resistensi sehari-hari yang dilakukan oleh guru di Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda (Madrasah ITH) merupakan respons yang terarah terhadap homogenisasi kebijakan pendidikan nasional yang sering kali mengabaikan kebutuhan lokal. Tindakan resistensi ini tercermin dalam berbagai strategi, termasuk pengembangan kurikulum lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Tengger, penghapusan stratifikasi pendidikan yang menantang struktur hierarkis dalam sistem formal, serta adopsi pendekatan disiplin yang berbasis pada kearifan lokal. Melalui upaya-upaya ini, para guru di Madrasah ITH tidak hanya mempertahankan peran mereka, tetapi juga menciptakan ruang baru untuk memberdayakan komunitas di Desa Ranupani.

Selain itu, resistensi sehari-hari ini lebih menyoroti peran guru sebagai agen perubahan yang menjembatani nilai-nilai tradisional masyarakat Tengger dengan tuntutan sistem pendidikan formal. Strategi yang mereka gunakan dapat dianggap melampaui sekadar praktik resistensi terhadap aparatus negara, tetapi juga membangun model pendidikan yang relevan secara kultural dan inklusif. Dalam konteks Desa Ranupani, upaya ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat untuk mempertahankan identitas lokal sekaligus mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan konteks lokal dalam perancangan kebijakan pendidikan nasional. Temuan ini tidak hanya relevan untuk desa Ranupani, tetapi juga menawarkan wawasan berharga bagi pengembangan model pendidikan berbasis lokal di wilayah marjinal lainnya. Dengan memahami dinamika praktik perlawanan sehari-hari ini, pembuat kebijakan dapat merancang pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan spesifik komunitas lokal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)**

Penelitian ini diselenggarakan dalam program "Bilateral Research Collaboration Antropologi UGM dengan Institute Fur Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK UZH)" dengan tema "*Cultivating Future: Anthropological Explorations of Alternative Education in Indonesia*". Kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agamben, G. (2009). *"What is an apparatus?" and other essays*. Stanford University Press.
- Amasuba, Y. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Terhadap kesenjangan Pendidikan di Kota dan Desa. In A. Wijayanto, Apridar, & I. N. Marani (Eds.), *Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Mutu Pembelajaran* (1st ed.).
- Apple, M. W. (2011). *Education and Power*. Taylor & Francis.
- Apple, M. W. (2019). *Ideology and curriculum* (Fourth edition). Routledge.
- Bhandari, N. B. (2022). Homi K. Bhabha's Third Space Theory and Cultural Identity Today: A Critical Review. *Prithvi Academic Journal*, 171–181. <https://doi.org/10.3126/paj.v5i1.45049>
- Choi, T. H. (2017). Hidden Transcripts of Teacher Resistance: A Case from South Korea. *Journal of Education Policy*, 32(4), 480–502. <https://doi.org/10.1080/02680939.2017.1290280>
- Clear, J. (2018). *Atomic habits: Tiny changes, remarkable results: an easy & proven way to build good habits & break bad ones*. Avery, an imprint of Penguin Random House.
- Desa Ranupani, P. (2024). *Profil Desa Ranupani*. Pemerintah Desa Ranupani.
- Farid, M., & Pratitis, N. T. (2022). Kesejahteraan psikologis guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS): Menguji peranan relisensi dan kebersyukuran. *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(2), 160-169.
- Foucault, M. (1991). *Discipline and punish: The birth of the prison* (Reprint). Penguin Books.
- Foucault, M., Fruchaud, H.-P., Lorenzini, D., & Luxon, N. (2019). *Discourse and truth and parrēsia*. The University of Chicago Press.
- Giroux, H. A. (2023). *Insurrections: Education in an Age of Counter-Revolutionary Politics*. Bloomsbury Academic.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in Practice* (3rd ed). Routledge.
- Hasanah, N. (2011). *Pembentukan Karakter Berdasarkan Budaya Pengasuhan Anak di Suku Tengger: Studi Tentang Anak-Anak Suku Tengger di Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., & Pahliana, S. (2024). Strategi Mengatasi Resistensi Terhadap Perubahan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Terhadap Praktik Manajemen. *Economic and Business Management International Journal*, 4(1).
- Hefner, R. W. (1990). *The political economy of mountain Java: An interpretive history*. University of California Press.
- Heriyansyah, H. (2018). Guru Adalah Manajer Sesungguhnya Di Sekolah. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(01). <https://doi.org/10.30868/im.v1i01.218>
- Huda, MI T. (2023, August 9). *Madrasah Award 2023: Tuntutlah Ilmu Sampai di Kaki Gunung Semeru*. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/miranupani/64d3a650633ebc355c695837/madrasah-award-2023-tuntutlah-ilmu-sampai-di-kaki-gunung-semeru>
- Johansson, A., & Vinthagen, S. (2015). Dimensions of everyday resistance: The Palestinian *Sumūd*. *Journal of Political Power*, 8(1), 109–139. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2015.1010803>
- Johansson, A., & Vinthagen, S. (2016). Dimensions of Everyday Resistance: An Analytical Framework. *Critical Sociology*, 42(3), 417–435. <https://doi.org/10.1177/0896920514524604>
- Johansson, A., & Vinthagen, S. (2020). *Conceptualizing "Everyday Resistance": A Transdisciplinary Approach*. Routledge.
- Lilja, M. (2022). The definition of resistance. *Journal of Political Power*, 15(2), 202–220. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2022.2061127>
- Muhaimin, & Kristiawan, M. (2019). Resistensi Guru Mengajar di Daerah Terpencil. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*.
- Muhibah, H. Y. (2015). *Problematika Guru dalam Pembelajaran di MIS Nurul Huda di Desa Kiapak (Salah Satu Desa Tertinggal) Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Pamungkas, P. D. (2019). *Jalan Hidup dalam Keterbatasan Ruang: Munculnya Batas dan Gesekan di Ranupani (TNBTS) Lumajang*. Universitas Brawijaya.

- Saputra, A. K. (2023). Keterbelakangan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. <https://doi.org/10.31237/osf.io/p94a6>
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale university press.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani* (Edisi pertama). Yayasan Obor Indonesia.
- Spindler, G. D. (Ed.). (1987). *Interpretive Ethnography of Education: At Home and Abroad*. Erlbaum.
- Suprayetno, E., & Pohan, J. E. (2022). Resistensi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terintegrasi pada Kinerja Guru di Kelas. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(2).
- Sutanto, S. (2024). Transformasi Pendidikan di Sekolah Dasar: Peran Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Jurnal Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 69–76. <https://doi.org/10.70277/jgsd.v1i1.0009>
- Wilson, S. (2022). Indigegogy: Using Indigenous Ways in Teaching. In *Teaching in the Anthropocene: Education in the Face of Environmental Crisis* (pp. 56–67). Canadian Scholars.